

**PEMETAAN MODEL PEMBELAJARAN PANCASILA  
PADA PERGURUAN TINGGI  
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

*Suptopo Bambang Ilkodar  
Lestanta Budiman  
Hastangka*

UPN “Veteran” Yogyakarta

[suptopo@yahoo.com](mailto:suptopo@yahoo.com)

[adilobo@ymail.com](mailto:adilobo@ymail.com)

[hastangka@gmail.com](mailto:hastangka@gmail.com)

**Abstrak**

Tulisan ini bermaksud menggambarkan bagaimana para dosen pengasuh matakuliah Pendidikan Pancasila pada perguruan tinggi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pembelajaran. Maksudnya adalah untuk mengetahui apakah cara mereka melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan pendidikan Pancasila secara umum adalah menumbuhkan pandangan, sikap, dan perilaku mahasiswa yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia. Tujuan tersebut termasuk ranah afektif. Pertanyaan yang hendak dicari jawabannya adalah apakah metode pembelajaran Pancasila pada Perguruan Tinggi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan tujuan membangun ranah afektif.

Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan dengan cara wawancara tatap muka. Respondennya adalah para dosen yang mengasuh matakuliah Pendidikan Pancasila, dipilih dengan metode purposive random sampling. Responden berasal dari perguruan tinggi negeri maupun swasta serta dari perguruan tinggi berbasis keagamaan dan perguruan tinggi berbasis kebangsaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran Pancasila pada perguruan tinggi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Kondisi yang belum sesuai itu dilakukan oleh lebih dari sepertiga dosen pengasuh matakuliah Pendidikan Pancasila. Ketidaksesuaian terjadi sejak rancangan perkuliahan, pelaksanaan pembelajaran, penugasan, hingga evaluasinya. Dalam hal rancangan perkuliahan, sebagian dosen tidak patuh terhadap rancangan yang dia susun sendiri. Bahkan ada sebagian kecil yang tidak membuat rancangan pembelajaran semester. Rancangan perkuliahan juga jarang diubah dan disesuaikan dengan kondisi kebutuhan mutakhir. Dalam proses pengajaran, seperempat dosen mengandalkan ceramah, dan kurang dari lima persen menerapkan metode pembelajaran inovatif. Sedangkan dalam penilaian, sebanyak tiga perempat dosen mengandalkan metode ujian tertulis, sebuah metode yang lebih cocok untuk pembelajaran ranah kognitif.

Kata kunci: Pancasila, pembelajaran, perguruan tinggi

## A. PENDAHULUAN

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 (UU 20/2003) tentang Sistem Pendidikan Nasional, lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia tidak wajib mengajarkan Pancasila kepada peserta didiknya. Sejak pendidikan jenjang usia dini hingga perguruan tinggi tidak ada kewajiban memasukkan mata pelajaran atau mata kuliah Pendidikan Pancasila ke dalam kurikulum.

Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmupengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olah raga, ketrampilan / kejuruan, dan muatan lokal. Tidak terdapat kewajiban untuk memuat pendidikan Pancasila.

Ayat (2) Pasal 37 Undang-undang tersebut menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat: pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa. Ayat tersebut juga tidak mewajibkan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi.

Beberapa tahun sesudah berlakunya Undang-Undang tersebut banyak pihak menyadari adanya hal yang salah dalam proses pendidikan di negeri ini khususnya jika dikaitkan dengan pola perilaku masyarakat terutama generasi muda. Munculnya kesadaran itu antara lain dipicu oleh kenyataan bahwa perilaku para penyelenggara negara, masyarakat luas, serta para pemuda dan pemudi negeri ini cenderung jauh dari nilai-nilai asli bangsa Indonesia. Oleh karena itu kemudian banyak pihak menyerukan agar Pendidikan Pancasila kembali dimasukkan ke dalam kurikulum

pendidikan mulai dari jenjang pra-sekolah hingga perguruan tinggi.

Pada tahun 2012 terbit Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 (UU 12/2012) tentang Pendidikan Tinggi yang di dalamnya mewajibkan setiap perguruan tinggi untuk memasukkan mata kuliah Pendidikan Pancasila dalam kurikulum. Pasal 35 ayat 3) Undang-undang tersebut menyatakan bahwa kurikulum Pendidikan Tiggi wajib memuat mata kuliah: agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia. Dengan kata lain sejak berlakunya UU 12/2012 Pendidikan Pancasila kembali menjadi mata kuliah wajib di semua perguruan tinggi di Indonesia.

Sebagaimana ditulis dalam Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Pancasila yang diterbitkan oleh Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswa Kementerian Riset dan Teknologi tahun 2016, standar kompetensi lulusan berupa sikap.

Dengan kata lain tujuan pembelajaran Pendidikan Pancasila lebih banyak mengarah ke ranah afektif dan psikomotorik ketimbang ranah kognitif. Dengan demikian proses pembelajaran Pendidikan Pancasila semestinya dilaksanakan dengan metode yang berbeda dibanding metode pembelajaran lain yang ranahnya lebih ke arah kognisi. Karena tujuan Pendidikan Pancasila adalah membangun dan membentuk sikap maka pertama-tama proses pendidikannya harus bisa menghadirkan penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila. Penghayatan hanya bisa dilakukan jika mahasiswa sudah memperoleh pengetahuan yang lengkap dan mendalam.

Dengan alur pemikiran seperti diuraikan di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui model-model pengajaran Pendidikan Pancasila pada perguruan tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta

untuk selanjutnya melakukan *asesment* terkait tingkat kesesuaian model pengajaran pada satu sisi, dengan standar kompetensi yang hendak diraih pada sisi lain.

Lokus penelitian dipilih Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pemilihan tersebut didasarkan setidaknya tiga pertimbangan, yaitu: pertama, Daerah Istimewa Yogyakarta dikenal sebagai kota pendidikan, dan dalam kenyataannya di wilayah tersebut terdapat lebih dari 100 perguruan tinggi baik berstatus negeri maupun swasta. Kedua, sampai saat ini Yogyakarta masih dijadikan rujukan atau barometer pendidikan di Indonesia. Ketiga, DIY dikenal sebagai kota perjuangan yang ditandai oleh fakta bahwa Yogyakarta pernah menjadi ibukota Republik Indonesia pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan.

Dalam penelusuran tim peneliti, sampai saat ini belum banyak atau mungkin belum ada penelitian maupun

kajian tentang model-model pendidikan Pancasila pada Perguruan Tinggi. Penelitian dan kajian tentang model pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang pernah dilakukan lebih banyak berfokus pada tingkat pendidikan sekolah menengah atas atau SMA.

Kajian tentang Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi dilakukan antara lain oleh Maftuh (2008), Kristiono (2017), dan Hidayah, Ulfah dan Suyitno (2019). Tema kajian mereka bervariasi tetapi belum ada yang berfokus pada model pembelajaran. Maftuh (2008) mengkaji tentang internalisasi nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Kajian itu berbasis pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang tidak mewajibkan adanya mata kuliah Pendidikan Pancasila. Saat itu belum lahir Undang-undang tentang Pendidikan Tinggi. Maftuh menemukan

bahwa sejak jaman Orde Lama, Orde Baru, hingga orde reformasi, pendidikan kewarganegaraan selalu penuh muatan politik dari pemerintah yang sedang berkuasa. Akibatnya isi pengajarannya bukan mencerahkan peserta didik sehingga tujuan untuk menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila tidak terwujud.

Kristiono (2017) mengkaji tentang penguatan ideologi Pancasila di kalangan mahasiswa. Dia mengkaji tingkat pengetahuan dan pemahaman mahasiswa tentang ideologi Pancasila dengan cara menguji pemahaman mereka untuk tiap-tiap sila dalam Pancasila. Hasilnya, menurut Kristiono, sudah baik. Menurut dia, yang perlu ditingkatkan adalah sikap positif terhadap Pancasila, yaitu dengan mempelajari secara lebih mendalam, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, menolak masuknya ideologi lain, dan membuktikan loyalitas kepada ideologi Pancasila.

Hidayah, Ulfah dan Suyitno (2019) mengkaji tentang pendekatan pembelajaran mata kuliah wajib umum Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Mereka melakukan penelitian tentang pendekatan-pendekatan pembelajaran dalam mata kuliah wajib umum Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi. Lokasi penelitian mereka di Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta dan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk setiap jurusan yang berbeda memerlukan pendekatan pembelajaran yang berbeda meskipun mata kuliahnya sama, yaitu Pendidikan Pancasila.

Berbeda dengan karya para peneliti dan penulis yang telah disebutkan di atas, penelitian ini berfokus pada upaya memetakan model pembelajaran mata kuliah Pendidikan Pancasila. Model dalam hal ini

dimaknai sebagai serangkaian proses pelaksanaan pembelajaran mulai dari perencanaan, pelaksanaa, hingga penilaian. Sasaran penelitiannya adalah seluruh dosen pengaasuh mata kuliah Pendidikan Pancasila di semua perguruan tinggi yang berlokasi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan demikian substansi yang dikaji dalam penelitian ini berbeda dengan substansi kajian-kajian sebelumnya. Kajian-kajian lain berfokus pada isi dan dampak pembelajaran atau mengenai pendekatan dalam proses pembelajaran; sedang penelitian ini berfokus pada proses pembelajarannya.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data primer. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara wawancara tatap muka.

Wawancara dilakukan terhadap dosen-dosen pengajar mata kuliah Pendidikan Pancasila pada perguruan tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terpilih sebagai sampel.

Pemilihan sampel (*sampling*) dilakukan dengan metode *purposive random sampling*. Mula-mula dilakukan pemilahan perguruan tinggi berdasar statusnya sehingga diperoleh kategori perguruan tinggi negeri dan kategori perguruan tinggi swasta. Dalam hal ini khusus perguruan tinggi swasta dipilih yang familiar bagi publik dan jumlah mahasiswanya tergolong besar.

Selanjutnya, pada masing-masing kategori baik perguruan tinggi negeri (PTN) maupun perguruan tinggi swasta (PTS) dipilah lagi berdasar landasan filosofis atau misi yang menlandasi keberadaan perguruan tinggi tersebut. Dari pemilahan tersebut diperoleh kategori perguruan tinggi negeri berbasis kebangsaan dan perguruan tinggi negeri berbasis

keagamaan. Demikian pula pada perguruan tinggi swasta juga dilakukan pemilahan antara perguruan tinggi swasta berbasis kebangsaan dan perguruan tinggi swasta berbasis keagamaan.

Pada masing-masing kategori perguruan tinggi tersebut pertama-tama dikumpulkan data seluruh dosen yang mengajar mata kuliah Pendidikan Pancasila. Dari data tersebut dilakukan pemilihan sampel. Metode yang digunakan adalah dengan cara acak, yaitu diundi berdasar nomor urut pada catatan nama dosen yang telah dibuat sebelumnya.

Selanjutnya dilakukan wawancara oleh petugas enumerator. Para petugas enumerator adalah mahasiswa pada perguruan tinggi yang menjadi sampel. Jadi pewawancara untuk dosen UGM adalah mahasiswa UGM, pewawancara untuk dosen UIN adalah mahasiswa UIN, dan demikian seterusnya.

Pengolahan data dilakukan dengan metode statistik sederhana yaitu dengan menghitung frekuensi jawaban untuk masing-masing pertanyaan. Selanjutnya dilakukan tabulasi silang untuk jawaban dari beberapa pertanyaan.

### **C. TEMUAN**

Dari data yang terkumpul dalam penelitian ini diketahui bahwa mayoritas (41,56%) dosen pengasuh matakuliah Pendidikan Pancasila pada perguruan tinggi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menjalankan tugas tersebut lebih dari sepuluh tahun. Dengan kata lain mereka telah memiliki pengalaman yang cukup dalam melaksanakan pembelajaran Pancasila. Selanjutnya sebanyak seperempat (25%) telah melaksanakan tugas tersebut selama enam sampai sepuluh tahun, dan sepertiga sisanya memiliki pengalaman mengajar matakuliah Pendidikan Pancasila kurang dari lima tahun.

Sebagaimana lazimnya dalam setiap bidang pekerjaan selalu ada pelatihan bagi para pelakunya maka dalam dunia pendidikan juga selalu ada pelatihan metode pembelajaran. Penguasaan metode pembelajaran sangat penting dalam membantu mencapai tujuan pembelajaran. Melalui pelatihan metode pembelajaran semua dosen bisa menyusun rencana pembelajaran, melaksanakan sesuai dengan metode yang dipilih, serta melakukan evaluasi hasil pembelajaran dengan baik. Terkait hal tersebut para dosen pengampu matakuliah Pendidikan Pancasila hampir semua dosen sudah pernah mengikuti pelatihan. Hanya sedikit sekali (4,17%) yang belum pernah mengikuti pelatihan metode pembelajaran.

Meski terdapat sebagian kecil dosen pengasuh matakuliah Pendidikan Pancasila yang belum pernah mengikuti pelatihan pembelajaran, pada kenyataannya semua membuat

rancangan perkuliahan semester (RPS) untuk matakuliah yang mereka asuh. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa meskipun kualitas isinya mungkin berbeda-beda, faktanya semua dosen sudah membuat pedoman atau rambu-rambu dalam melaksanakan tugas pembelajaran.

Meskipun semua dosen sudah membuat RPS, ternyata tidak semua dosen mematuhi rancangan yang dibuatnya sendiri tersebut. Hanya ebanyak sepertiga (33,33%) dosen yang menyatakan melaksanakan sepenuhnya rancangan pembelajaran yang telah dia buat. Lebih dari setengah (62,25%) hanya melaksanakan sebagian dari RPS yang dia buat, dan sebanyak 4,17% dosen pengampu matakuliah Pendidikan Pancasila di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak melaksanakan RPS yang telah dia buat. Dengan kata lain, bagi dosen yang tidak konsisten itu RPS hanya merupakan dokumen

administratif, bukan sebuah panduan dalam melaksanakan pembelajaran.

Terkait rencana pembelajaran semester (RPS), selain urusan kepatuhan ada pula urusan pembaharuan isi rancangan perkuliahan agar sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan dalam membangun karakter mahasiswa yang sejalan dengan ideologi Pancasila. Dalam urusan pembaharuan isi RPS itu penelitian ini memperoleh data bahwa 12,50 persen dosen pengasuh matakuliah Pendidikan Pancasila tidak pernah melakukan pembaharuan. Terdapat banyak kemungkinan makna atas hal tersebut, mulai dari materi pengajarannya bersifat dogmatis, proses pembelajaran dilakukan secara monoton, hingga kemungkinan tidak digunakannya teknologi modern. Dengan kata lain, dengan tidak pernah dilakukan pembaharuan RPS terdapat kemungkinan ketidaktepatan metode

dan kurang-aktualan isi dibandingkan dengan tujuan pembelajaran.

Masih terkait pembaharuan RPS, sebanyak 75 persen dosen kadang-kadang melakukan perubahan, yaitu sesuai dengan tuntutan kebutuhan. Adapun sisanya sebanyak 12,50 persen dosen lebih sering melakukan pembaharuan RPS.

Dari segi metode pembelajaran, sebanyak 33,33 persen dosen menggunakan metode ceramah sebagai cara utama dalam pembelajaran. Sebagaimana dikemukakan pada bagian teori, metode ceramah mengandung sejumlah kelemahan seperti komunikasi bersifat hanya satu arah, dosen mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan individual mahasiswa yang heterogen; dan mahasiswa tidak mendapat kesempatan berfikir dan berperilaku kreatif. Selanjutnya sebanyak 53 persen dosen menggunakan metode diskusi, sebuah metode yang bisa membangkitkan

minat belajar mahasiswa dilaksanakan dengan pengelolaan yang tepat. Hanya sebanyak 13,67 persen dosen yang menggunakan metode penugasan lain, antara lain berupa *social project*, membuat film pendek, serta berkunjung ke tempat ibadah dan berdiskusi dengan pimpinan agama setempat.

Untuk evaluasi pembelajaran, sebagian besar (45,83%) dosen melakukan penilaian hasil belajar dengan cara klasik yaitu memberi bobot hingga 60 persen atau lebih untuk ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS) serta 20 persen atau lebih untuk kehadiran / presensi. Selanjutnya sebanyak 41,67 persen melakukan penilaian secara dinamis, yaitu menggunakan proporsi yang seimbang antar penugasan-penugasan, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Terakhir sebanyak 12,50 persen melakukan penilaian dengan metode progresif yaitu tidak menempatkan ujian tengah semester dan

ujian akhir semester sebagai ukuran utama melainkan dengan bentuk-bentuk penugasan lain berupa tugas-tugas individu dan tugas-tugas kelompok.

Khusus untuk ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS) sebagian terbesar terbesar (75%) dosen melakukannya dengan memberikan soal dan jawaban tertulis yang dikerjakan di dalam kelas. Selebihnya sebanyak 8,33 persen melakukan ujian lisan, 8,34% memberi tugas penulisan makalah, dan 8,33% memberi tugas berupa social project.

#### **D. PEMBAHASAN**

Berdasar temuan-temuan di atas, yaitu mulai dari tidak adanya Rancangan Pembelajaran, metode pengajaran yang mengutamakan ceramah, hingga metode evaluasi yang menekankan hasil belajar dengan metode tes tulis, dapat dikatakan bahwa seluruhnya mengarah pada ranah kognitif. Padahal Pendidikan Pancasila

bertujuan membentuk sikap dan perilaku mahasiswa agar sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.

Dalam Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Pancasila yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi terbitan tahun 2016 dinyatakan bahwa kompetensi yang hendak diraih adalah sejumlah sepuluh sikap dan perilaku. Sepuluh kompetensi yang hendak diraih dalam Pendidikan Pancasila tersebut semuanya ada pada ranah afektif. Tidak ada yang mengarah pada ranah kognitif. Dengan demikian menjadi tidak sinkron ketika ternyata metode pembelajaran dan evaluasinya lebih bersifat kognitif.

Temuan-temuan yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, yaitu tidak adanya Rancangan Pembelajaran, metode pengajaran yang mengutamakan ceramah, dan metode evaluasi yang lebih sering menuntut

kemampuan menghafal, membuat Pendidikan Pancasila kurang disukai oleh mahasiswa.

Ketika dilakukan pencermatan lebih mendalam, yaitu dengan melakukan komparasi antara perguruan tinggi negeri dengan perguruan tinggi swasta, serta antara perguruan tinggi berbasis kebangsaan dengan yang berbasis keagamaan, terlihat bahwa model atau metode pembelajaran Pancasila cenderung sama. Kesamaan tersebut, terutama terdapat dalam hal metode pembelajaran dan metode evaluasi yang sama-sama lebih mengarah pada ranah kognitif. Metode pengajarannya sama-sama dominan menggunakan metode ceramah.

Sementara itu dari segi isi materi pembelajaran, mayoritas dosen telah mengikuti kisi-kisi yang ditetapkan oleh Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi. Bahan ajar atau referensinya bervariasi tetapi secara keseluruhan mencakup isi yang telah ditentukan.

Dengan demikian dari segi isi materi relatif sudah baik. Hanya dari segi penyampaiannya sajalah yang nampaknya masih perlu ada perbaikan.

#### **E. KESIMPULAN**

Penelitian ini berkesimpulan bahwa metode pembelajaran Pendidikan Pancasila pada perguruan tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk sebagian (25%-33%) belum efektif, yaitu metode yang ditempuh tidak sesuai tujuan pembelajaran. Kompetensi yang hendak dicapai dalam pendidikan Pancasila, yaitu kompetensi sikap, ada pada ranah afektif; sedangkan metode pembelajarannya lebih banyak mengarah pada ranah kognitif.

Hal itu diperburuk dengan temuan bahwa mayoritas dosen pengasuh mata kuliah Pendidikan Pancasila tidak melakukan pembaharuan Rancangan Pembelajaran Semester (RPS). Hal itu menandakan bahwa pembelajarannya dilakukan

secara kurang *up to date* atau mungkin monoton. Kenyataan seperti itu pada akhirnya membuat para mahasiswa kurang tertarik dan menjadi bosan. Padahal mata kuliah Pendidikan Pancasila memiliki peran strategis yaitu misi untuk membentuk sikap dan perilaku mahasiswa agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Budiardjo, Lily (2001), *Hakikat Metode Instruksional*. Jakarta, Direktorat Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
- \_\_\_\_\_ (2001), *Metode Pemberian Tugas*. Jakarta, Direktorat Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
- Camellia & Puspa Dianti, “Bahan Ajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Berbasis Nilai-Nilai Karakter dalam Membentuk Sikap/Watak Kewarganegaraan Siswa (Civics Dispositions)”, *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*. Volume 3 Nomor 1, Mei 2016
- Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (2016), *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta, 2016
- Fitriasari, Susan dan Riyan Yudistira (2017), “Model Pembelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan untuk Menumbuhkan Karakter Peduli Lingkungan Hidup Siswa”, *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III*, 11 November 2017, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta
- Ginting, Heryansyah (2017), “Peranan Pancasila dalam Menumbuhkan Karakter Bangsa Pada Generasi Muda Di Era Global”, *Prosiding Seminar Nasional Tahunan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan*. Universitas Negeri Medan, November 2017
- Gustin dan Suharno (2015), “Evaluasi Pembelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan dengan Pendekatan Saintifik”, *Harmoni Sosial; Jurnal Pendidikan IPS*. Volume 2, nomor 2, September 2015
- Hidayah, Yayuk, Nufikha Ulfah, Suyitno (2019). “Analisis Pendekatan Pembelajaran Mata Kuliah Wajib Umum Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi”, *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol.4 No.1 Tahun 2019
- Irawan, Prasetya (2001), *Evaluasi Proses Belajar Mengajar*. Jakarta, Direktorat Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
- Kristiono, Natal (2017), “Penguatan Ideologi Pancasila di Kalangan Mahasiswa Universitas Negeri Semarang”, *Harmony*. Volume 2, nomor 2, November 2017
- Maftuh, Bunyamin (2008), “Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Nasionalisme Melalui Pendidikan Kewarganegaraan”, *Jurnal Educationist*. Volume II nomor 2, Juli 2008
- Misnaini, Sari (2018), “Pengaruh Pembelajaran Nilai-Nilai Pancasila Terhadap Perilaku Mahasiswa di STIK Bina Husada”, *Jurnal Ilmiah P2M STKIP Siliwangi*. Volume 5, nomor 2, November 2018
- Raharja, Handy Yoga (2019), “Relevansi Pancasila Era Industry 4.0 Dan Society 5.0 Di Pendidikan Tinggi Vokasi”,

*Journal of Digital Education,  
Communication, and Art.*  
Volume 2, no 1, March 2019

Sari, Wiwin Anggita dan Bukman Lian (2017), "Menjadikan Mata Kuliah Pendidikan Pancasila Sebagai Media Penanaman Nilai-Nilai Bela Negara", *Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan*. Volume 1, nomor 1, Juli-Desember 2017

Suciatai (2001), *Taksonomi Tujuan Instruksional*. Jakarta, Direktorat Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional

Sulianti, Ani (2018), "Revitalisasi Pendidikan Pancasila dalam Pembentukan Life Skill", *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*. Volume 6, nomor 2, Oktober 2018.  
Supriyono (2014), "Membangun Karakter Mahasiswa Berbasis Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Resolusi Konflik", *Edutech*. Tahun 13, Volume 1, nomor 3, Oktober 2014

Yudistira R dan Fitriasari S(2017), "Model Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk Menumbuhkan Karakter Peduli Lingkungan Hidup Siswa", *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III*, 11 November 2017, Yogyakarta, Universitas Ahmad Dahlan

Zainul, Asmawi (2001), *Alternative Assesment*. Jakarta, Direktorat Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional

## Dokumen

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.